

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda adalah generasi penerus, sehingga pemuda yang mempunyai potensi besar ini perlu didukung sepenuhnya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, agar tetap dalam posisi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kehidupan sosial masyarakat pemuda memiliki posisi yang strategis baik dalam hal pengembangan pemuda itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dalam hal ini berarti pemuda mempunyai posisi dalam membangun bangsa dan negara (Mubyarto dkk,1994: 130)

Sedemikian besarnya peran dan tanggung jawab pemuda terhadap bangsa ini, namun mereka masih dihadapkan pada masalah sosial yang akhir-akhir ini semakin banyak, berat dan kompleks, sehingga lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia (pemuda) semakin dibutuhkan. Pemuda merupakan sumber daya manusia yang terpenting sehingga mereka dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan serta keberanian untuk menjawab dinamika kehidupan. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa program pembinaan karang taruna yang meliputi peningkatan manajemen organisasi, manajemen kewirausahaan dan pelatihan keterampilan dan lain-lain (I.L Pasaribu,1978: 47).

Dalam menciptakan sumber daya manusia (pemuda) yang baik dan efektif yaitu melalui pendidikan organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih orang yang terlibat dalam suatu relasi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Para anggota organisasi yang berbeda-beda fungsinya itu

mengelola tujuan kolektif berdasarkan struktur hierarki yang relatif stabil (Strother dalam Leavitt 1963).

Organisasi berasal dari kata *organon* yang dalam bahasa Yunani berarti alat. Pengertian organisasi sudah banyak disampaikan para ahli, Chester I barnard (1938), berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama dari sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi merupakan suatu bentuk relasi sosial yang dihasilkan oleh ikatan antar personal yang memiliki aturan untuk membatasi dan menata beberapa fungsi yang bersifat regular, menata tindakan individual dan relasi sosial, dan relasi sosial yang terbentuk itu mempunyai seorang kepala dan staf administrasi (Weber,1947)

Max Weber (1864-1920) mengatakan, organisasi merupakan suatu sistem legal rasional dari struktur dan proses yang menggambarkan rancangan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut birokrasi. Birokrasi merupakan rancangan yang rasional untuk mencapai fungsi yang optimum dari setiap bagian (departemen, tingkatan dan unit) yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi kepada keseluruhan (kesatuan tujuan). Birokrasi itu bersifat legal karna di situ ada kekuasaan dan kewenangan yang akan teruji melauai sistem peraturan dan prosedural yang diperlihatkan oleh cara karyawan bekerja (Jefferey, 1997)

Organisasi adalah tempat atau wadah yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumberdaya organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Setiap organisasi pasti memiliki unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur tersebut, yakni ada sejumlah orang. Organisasi dibentuk oleh dua orang atau lebih yang menyatakan kesediaan mereka untuk bekerjasama secara sukarela atau dengan tekanan peraturan tertentu, yang menjalankan tujuan bersama yang sudah disepakati. Kemudian, tujuan tersebut dirumuskan dalam seperangkat peranan yang dirinci atas tugas dan fungsi yang dijalankan melalui struktur dan hierarki jabatan, berdasarkan tata aturan komunikasi secara vertikal, horizontal, maupun diagonal dan yang selalu berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial, atau kultural di sekelilingnya.

Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran atas keadaan dan permasalahannya di lingkungan serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut usaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya karang taruna.

Dalam membentuk suatu integritas dalam karang taruna tentunya harus berlandaskan kepada visi, misi dan tujuan orientasinya, yaitu ingin menumbuh kembangkan potensi remaja/pemuda dari berbagai aspek.

Di Cisaranten Wetan, pada tahun 2014 kebelakang rasa kebersamaan pemuda tidak berjalan dengan baik hal ini terlihat dari banyaknya tawuran antar RW dan kenakalan remaja di masyarakat. Karenanya, Karang Taruna Cisaranten Wetan yang mulai dibentuk pada tahun 2015 berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut. Dan juga menumbuhkan asas kekeluargaan dalam menjalankan roda organisasi. Pada perkembangannya karang taruna mulai dapat diterima dan menjadi suatu wadah organisasi pemuda yang mengkoordinir kegiatan dan program kerja untuk masyarakat hal ini mulai terasa ketika direalisikannya program kerja karang taruna pada tahun 2016-2018 dalam membentuk solidaritas pemuda di Kelurahan Cisaranten Wetan terdapat beberapa pola ataupun program yang dibangun oleh Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan dalam mewujudkan integritas dan solidaritas pemuda di Cisaranten, program kerja yang dilakukan mencakup program yang bersifat formal diantaranya melalui penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, dan peringatan hari besar seperti 17 agustus dan hari ulang tahun Kota Bandung. dalam setiap acara yang dilaksanakan diharapkan dapat menjaga keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Selain itu dapat membentuk rasa kebersamaan dan saling memiliki antar anggota, dengan mengedepankan rasa toleransi dalam segala aspek masyarakat.

Sedangkan program kerja yang bersifat nonformal seperti diadakannya ngobar (ngopi bareng) pemuda Cisaranten Wetan, dan kegiatan fun futsal disetiap karang taruna unit. kegiatan ini bertujuan untuk membentuk para anggota agar dapat mempunyai rasa saling memiliki terhadap organisasi dan seluruh anggota di

dalamnya, dan untuk memberikan pengetahuan kepada para pemuda di lingkungan Cisaranten Wetan melalui program pendidikan dan pelatihan, karena salah satu tujuan Karang Taruna Indonesia untuk mengarahkan para pemuda/remaja pada kemandirian, produktif, berdayaguna, dan berhasil guna, maka para pemuda diupayakan untuk diarahkan pada pemberdayaan ekonomi produktif, atau dilakukannya latihan manajemen usaha rumah tangga.

Di dalam masyarakat, ada dua hal yang biasa diidentifikasi dalam membedakan corak solidaritas. Ferdinand Tonnies (1855-1936) membagi dua tipe masyarakat berdasarkan corak solidaritasnya tersebut, yaitu kehendak alam, yang menjadi dasar dari teori *Gemeinschaft* dan kehendak rasional dasar dari teori *Gesellschaft*. Kehendak alam dapat diartikan pada masyarakat tradisional, sementara kehendak rasional menjadi patokan pada masyarakat industri modern. Terdapat perberbedaan masyarakat menurut norma-norma yang ada dan berubah dari natural menjadi rasional. Akhirnya, masyarakat merupakan sebuah kesatuan organik yang dilandasi oleh semacam kehendak tertentu. (Graham C.Kinlock, 2009: 95-96)

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas mengenai solidaritas pemuda melalui organisasi Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan. Melalui program kerja yang dijalankan oleh karang taruna, sehingga pemuda dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masyarakat dengan baik, sehingga skripsi penelitian ini akan diuraikan mengenai **“Solidaritas Pemuda Melalui Organisasi Karang Taruna (Studi Kasus Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas sehingga dapat dibuat identifikasi masalah, sedangkan tujuan identifikasi masalah dalam skripsi untuk memberikan batasan dalam menjelaskan masalah yang diteliti sehingga pembahasan tidak melebar.

Adapun masalah yang diidentifikasi yaitu meliputi kurangnya solidaritas antar pemuda di lingkungan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung sehingga terdapat beberapa blok pemuda, pemuda lupa akan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat, dan kurangnya pemahaman pemuda terhadap keikutsertaannya dalam mengikuti karang taruna.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, tentang solidaritas pemuda melalui organisasi karang taruna di lingkungan Cisaranten Wetan maka timbul suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan dalam membentuk solidaritas pemuda pada tahun 2015-2018 ?
2. Program kerja apa saja yang dilakukan oleh Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan dalam membentuk solidaritas pemuda pada tahun 2015-2018 ?
3. Bagaimana solidaritas pemuda melalui organisasi Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan pada tahun 2015-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan dalam membentuk solidaritas pemuda pada tahun 2015-2018
2. Untuk mengetahui program kerja Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan dalam membentuk solidaritas pemuda pada tahun 2015-2018
3. Untuk mengetahui solidaritas pemuda Cisaranten Wetan melalui organisasi Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan pada tahun 2015-2018

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan. Kegunaannya yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

- a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosiologi khususnya yang berkaitan dengan solidaritas sosial, teori birokrasi dan sosiologi organisasi tentang solidaritas pemuda Cisaranten Wetan melalui organisasi karang taruna.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi Karang Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam membentuk solidaritas pemuda di lingkungan setempat.
- b. Kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, sebagai acuan referensi untuk bahan penelitian mengenai solidaritas pemuda Cisaranten Wetan melalui organisasi karang taruna, setidaknya ada gambaran melalui hasil penelitian yang dibuat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pokok pikiran utama Max Weber yang berkaitan dengan organisasi adalah birokrasi. Weber mengemukakan, pertumbuhan suatu organisasi bersekala besar dan yang dapat di prediksi secara pasti hanya akan terjadi apabila pertumbuhan itu disertai formalisasi. Pada sisi ini, Weber sebenarnya mengadopsi gagasan ideal-rasional dari bentuk organisasi yang murni, yang kemudian dia sebut birokrasi. Lebih lanjut, menurut Weber, hanya organisasi yang menggunakan prinsip-prinsip birokrasi akan dapat menampilkan pekerjaan lebih efisien dan mencapai hasil yang maksimum, dan semuanya itu dilakukan melalui apa yang dia sebut sebagai wewenang.

Wewenang merupakan kombinasi dari kekuasaan dan legitimasi, meskipun kita dapat memandang kekuasaan sebagai legitimasi pula (Etzioni,1964). Ada tiga tipe wewenang menurut Weber, yaitu:

- a. Wewenang rasional/legal (*rational/legal grounds*), yakni wewenang yang dimiliki seseorang dalam organisasi untuk melaksanakan komando atau memberikan perintah dalam relasi yang impersonal kepada orang lain, berdasarkan aturan-aturan normatif yang jelas, benar, dan adil. Wewenang legal rasional merupakan wewenang yang sangat relevan dengan konsep birokrasi. Wewenang dalam suatu birokrasi bersumber dari kekuasaan birokrat, kekuasaan tersebut bersumber dari peraturan-peraturan birokrasi atau peraturan yang dibuat oleh birokrat untuk memerintah dan perintah itu akan diterima oleh para anggota organisasi. Weber melihat birokrasi sebagai suatu pola yang efisien bagi administrasi masal. Pengalamannya cenderung membuktikan bahwa tipe birokrasi murni dari administrasi organisasi yang mencapai sukses dikarenakan organisasi tersebut menjalankan prinsip-prinsip organisasi monokrasi, seperti hierarkis, rasional, formal, kontrol, disiplin, mengutamakan efisiensi, mengandalkan kemampuan teknis personal tingkat tinggi, dan lain-lain.

Weber mengemukakan beberapa prinsip birokrasi, yakni birokrasi itu berbasis pada peraturan, seperti aturan untuk memecahkan masalah, menetapkan standarisasi, dan menjaga kesetaraan dalam organisasi, birokrasi itu bebas pada konsep kompetensi. Jadi, dalam birokrasi harus ada pembagian kerja secara sistematis dimana setiap peran harus dirumuskan secara jelas hak dan kekuasaan dari pembagian peran tersebut.

Esensi dari birokrasi adalah hierarki, para administrator yang ditunjuk untuk melaksanakan peran tertentu harus berbasis pada pengetahuan dan pelatihan. Oleh karena itu, birokrasi harus mempunyai sistem untuk menempatkan para administrator pada posisi peranan tertentu. Para anggota birokrasi tidak boleh merupakan “pemilik” dari organisasi tersebut. Para birokrat harus bebas untuk mengalokasikan sumber daya mereka bagi organisasi tanpa dipengaruhi oleh ancaman dari luar organisasi, suatu organisasi yang baik membutuhkan pengelolaan isu-isu komunikasi secara tertulis.

- b. Wewenang tradisional (*tradisional grounds*) yakni suatu wewenang yang di miliki seseorang karna tradisi atau keturunan, dengan wewenang tersebut seseorang memiliki status tertentu dalam organisasi sehingga dia dapat memerintah dan membangun ketaatan dan loyalitas orang lain terhadap dia. Penerimaan dan pengakuan terhadap tradisi wewenang ini juga merupakan salah satu bentuk tradisi legitimasi.
- c. Wewenang karismatik (*charismatic grounds*), yakni wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai karisma, dari karisma itulah dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk memerintah orang lain sehingga mereka akan mentaati perintah itu dan merasa terikat dengan pola-pola normatif dan bahkan merasa dapat di selamatkan oleh yang memiliki wewenang karismatik itu. Patut dicatat bahwa tidak seperti birokrat, wewenang karismatik di peroleh dari relasi

keseharian tatanan sosial; pemimpin karismatik merupakan pemimpin yang revolusioner dan membangun wewenangnya dalam tradisi kehidupannya sehari-hari; seorang pemimpin karismatik juga merupakan seorang ahli pidato yang muncul dari demonstrasi “kekuatan magis” maupun “kepahlawanan”; dan Weber tidak memaksudkan pemimpin karismatik sebagai seseorang yang mampu mempersuasi masa.

Menurut Weber, tatanan birokrasi itu lebih erat dengan bentuk kewenangan rasional/legal (*rational/legal authority*) yang dapat mengatur staf birokrasi administratif. Wewenang rasional atau legal ini dimiliki oleh seorang pemimpin suatu organisasi yang memerintah orang lain tidak hanya karena mereka merupakan bawahan, tetapi ketaatan mereka itu terbentuk secara rasional karena ada peraturan yang bersifat normatif. Dalam birokrasi itulah muncul tiga praktik ideal birokrasi yang meliputi kekuasaan, wewenang, dan legitimasi (*power, authority, and legitimacy*).

Berdasarkan terminologi ilmu politik, dikenal empat model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktek pembangunan dunia ketiga, yaitu : Weberian, Parkinsonian, Jacksonian, dan Orwellian (Fatah, 1998: 192). Namun dari keempat teori tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah model birokrasi weberian. Istilah ini diambil dari nama Max weber sebagai sosiolog yang mengkaji tentang birokrasi, yang juga sebagai seorang yang mencetuskan konsep birokrasi modern. Birokrasi weberian dianggap cocok dalam penelitian ini karena menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memudahkan

administrasi, biasanya masalah organisasi yang ruwet dan kompleks terdisebut organisasi pemerintah. Wapada pada birokrasi besar, Weber dikenal dengan konsepnya tentang tipe ideal bagi seluruh otoritas legal rasional, otoritas legal rasional disini adalah birokrasi. Menurut Weber (1947: 330) kriteria-kriteria tipe-tipe ideal birokrasi:

1. *“A continuous organization of official functions bound by rules”*. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
2. *“A specific sphere of competence”*. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya di bidang yang kompeten, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi.
3. *“The organization of officers follows the principle of hierarchy”*. Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan.
4. *“The rules which regulate the conduct of an office may be technical rules or norms”*. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis sesuai dengan aturan dan norma.
5. *“The members of the administrative staff should be completely separated from ownership of the means of production or administration”*. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi.
6. *“There is also a complete absence of appropriation of his official position by the incumbent”*. Pemegang jabatan tidak sama dengan jabatannya.

7. *“Administrative act’s, decision, and rules are formulated and recorded in writing”*. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern.
8. *“Legal authority can be exercised in a wide variety of different forms which will be distinguished and discussed later”*. Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial tahu bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi dua tipe solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru karena adanya perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. (George Ritzer, 2012: 90).

Mengenai solidaritas, Emile Durkheim menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Division Of Labor In Society* yang menganalisa pengaruh atau fungsi kompleksitas dan spesialisasi pembagian kerja dalam struktur sosial dan perubahan-perubahan yang diakibatkan dalam bentuk pokok solidaritas sosial.

Durkheim membagi solidaritas menjadi dua kaitanya dalam pertumbuhan pembagian kerja yang menyebabkan perubahan struktur sosial dari solidaritas

mekanik dan organik. Solidaritas mekanik dapat dicontohkan dengan adanya toleransi dalam perbedaan urusan, misalnya majlis ulama Indonesia dengan pemerintah Negara, meskipun berbeda urusan tapi satu dengan yang lainnya tetap bersolidaritas dalam kehidupan bersama.

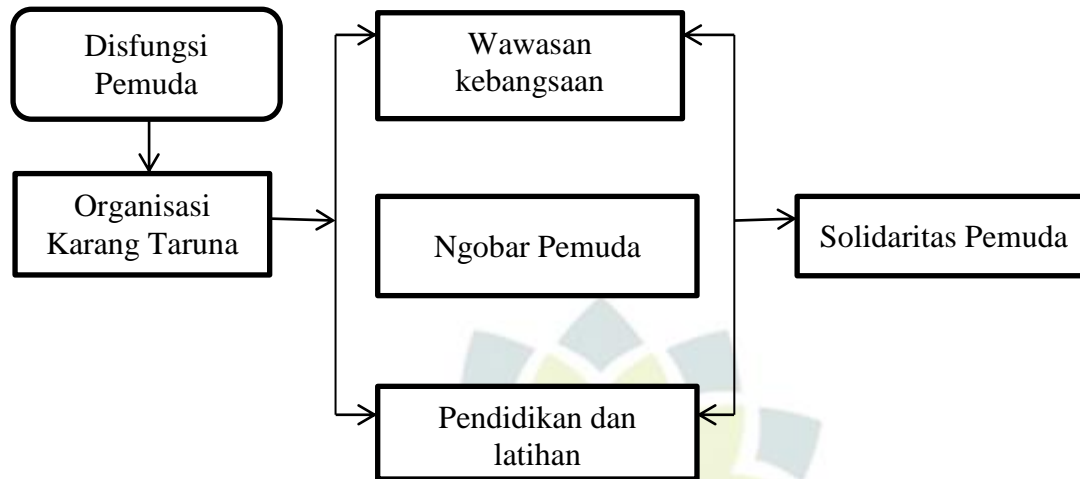
Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik ditandai dengan hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) dari pada yang bersifat represif. Tujuan kedua hukum ini sangat berbeda hukum represif mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan kuat, hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antar individu.

Pengertian solidaritas sosial berasal dari dua pemaknaan kata yaitu solidaritas dan sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Solidaritas sosial terdiri dari dua tipe solidaritas, Ferdinand Tonnies membagi dua tipe masyarakat berdasarkan corak solidaritasnya tersebut, yaitu kehendak alam, yang menjadi dasar dari teori *Gemeinschaft* dan kehendak rasional dasar dari teori *Gesellschaft*. Kehendak alam menggambarkan dasar bagi masyarakat tradisional, sementara kehendak rasional menjadi landasan bagi masyarakat industri modern. Sekelompok masyarakat kemudian menjadi berbeda menurut norma-norma yang berlaku dan berubah dari natural menjadi rasional. Akhirnya, masyarakat merupakan sebuah kesatuan organik yang dilandasi oleh semacam kehendak tertentu. Hubungan ini terdiri atas keinginan perilaku individu yang menyatu untuk membentuk kehendak perilaku kelompok (kolektif) sehingga terbentuklah struktur

sosial. Interaksi yang menggambarkan ungkapan kehendak perilaku ini bersifat saling bertukar antara kendak individu dan kehendak kolektif.

Tonnies terkenal karena tipologi yang cenderung dikotomis dari dua bentuk pokok kehendak sosial – *gemeinschaft* dan *gesellschaft* – yang dia kembangkan. Dia menggambarkan masyarakat komunal dan tradisional yang didasarkan pada hubungan keluarga yang dekat, norma-norma cinta, pengertian dan perlindungan, serta pertalian keluarga dalam masyarakat dan lokalitas dan bahasa (seperti masyarakat “alamiah”). Disisi lain, *gesellschaft* dibentuk dalam masyarakat industri modern yang didasarkan pada hubungan-hubungan ekonomi, impersonal dan artifisial (palsu), norma-norma dan nilai-nilai ekonomi, tenaga kerja dan konsumsi; serta pertalian kelas sosial dan pertukaran kontrak ekonomi. (Graham C.Kinlock, 2009: 95-96).





Gambar 1.1 Sekema Konseptual

Dari sekema konseptual diatas dapat di jelaskan bahwa adanya suatu disfungsi pemuda di Kelurahan Cisaranten Wetan, Fungsi pemuda yang seharusnya menjadi salah satu aktor dalam membangun suatu bangsa, berbeda dengan fungsi yang seharusnya, pemuda di Kelurahan Cisaranten Wetan kebanyakan melakukan kenakalan-kenakalan seperti tawuran antar RW. Hal ini mulai sedikit berubah ketika Karan Taruna Kelurahan Cisaranten Wetan mulai terbentuk. Melalui program kerjanya sedikit bisa menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda disana.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG